

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari Bab I hingga Bab III, dapat disimpulkan bahwa kerja sama *Australia–Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) merupakan bentuk konkret dari implementasi paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merespons permasalahan kesehatan hewan yang serius, seperti zoonosis, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta *Lumpy Skin Disease* (LSD). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada sektor peternakan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa AIHSP berhasil memperkuat kapasitas daerah melalui pendekatan multisektor *One Health*, yang mengintegrasikan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai aktor subnasional terbukti memainkan peran aktif dalam kerja sama ini, ditunjukkan melalui penguatan sistem surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium veteriner, serta pelibatan masyarakat dan pemanfaatan instrumen kebijakan lokal seperti APBDes dan peraturan daerah. Melalui lensa teori paradiplomasi, terlihat bahwa keterlibatan pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mampu membentuk arah kerja sama berdasarkan kebutuhan lokal. AIHSP juga mengedepankan prinsip *local*

ownership, sehingga program yang dijalankan dapat lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan riil di lapangan.

4.2. Saran

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan dan menginstitutionalisasikan prinsip-prinsip AIHSP dalam kebijakan dan program daerah, terutama dalam menghadapi risiko zoonosis dan penyakit hewan lainnya di masa mendatang. Integrasi program AIHSP ke dalam rencana strategis daerah akan memperkuat keberlanjutan program meskipun dukungan dari pihak internasional telah berakhir. Selain itu, peningkatan kapasitas aktor lokal baik dari segi teknis maupun manajerial menjadi hal yang mendesak, agar respon terhadap wabah tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan sistematis. Upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah dan nasional, agar pendekatan *One Health* benar-benar terwujud secara menyeluruh.

Terakhir, kerja sama AIHSP memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan diplomasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh peran negara pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam membangun jejaring internasional yang selaras dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, model kerja sama seperti AIHSP patut dijadikan rujukan dalam membangun program-program serupa di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktor-aktor lokal dalam diplomasi internasional, karena melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, kebijakan global dapat lebih

bermakna dan berdampak secara nyata di tingkat akar rumput. Dengan memperkuat komitmen, kapasitas, dan koordinasi, maka kerja sama internasional di bidang kesehatan, seperti AIHSP, dapat terus menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan sistem kesehatan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.